

PENGUATAN TATA KELOLA *CAPACITY BUILDING* POS LINTAS BATAS NEGARA TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PERBATASAN ENTIKONG***STRENGTHENING GOVERNANCE OF CROSS-BORDER POST CAPACITY BUILDING FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS AT THE ENTIKONG BORDER*****Hardi Alunaza*, Anggi Putri, Annisa Ernianda**Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
Jalan Profesor Dokter H. Hadari Nawawi Kota Pontianak 78115, Indonesia**INFO ARTIKEL*****Riwayat Artikel:***

Diterima : 16 Juni 2024

Disetujui : 06 Juli 2024

Keywords:

border governance; indonesian migrant workers; entikong cross border

Kata Kunci:

tata kelola; pekerja migran indonesia; perbatasan entikong.

****) Korespondensi:***E-mail: hardi.asd@fisip.untan.ac.id

Abstract: this study aims to determine the governance of State Cross Border Posts in the field of capacity building and governance through border diplomacy during the handling of Covid-19 at the Entikong border in West Kalimantan. This study uses a qualitative approach with a descriptive study method within the framework of border governance theory and the concept of vitalization function. Data collection techniques used interviews and literature study. The data sources for this study are the Coordinator of the Entikong Indonesian Migrant Worker Protection Agency, the head of class II immigration, Entikong, West Kalimantan and the Head of Entikong District, as well as staff from the Entikong State Cross Border Post, as well as literature studies that come from reliable sources. Data analysis includes several stages, namely data collection, data simplification, presentation and drawing conclusions. Data validity was carried out using triangulation techniques. The results of this study are that the governance of the Entikong State Cross-Border Post already has fairly good infrastructure, such as the State Cross-Border Post office, International Land Terminal and other infrastructure. Improving governance in the field of capacity building at the Entikong State Cross-Border Post is carried out by increasing cooperation, facilities and in general it can be said that the capacity of the Entikong State Cross-Border Post has, especially when facing the Covid-19 pandemic. Another strategy is border diplomacy or cooperation between Indonesia and Malaysia.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pos lintas batas negara dalam bidang *capacity building* serta tata kelola melalui *border diplomacy* pada masa penanganan *coronavirus disease 2019* di perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian deskriptif dengan kerangka teori *border governance* dan konsep fungsi vitalisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara serta studi pustaka. Analisis data meliputi beberapa tahap yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil kajian ini yakni tata kelola Pos Lintas Batas Negara Entikong sudah memiliki infrastruktur yang cukup baik seperti seperti kantor Pos Lintas Batas Negara dan Terminal Darat Internasional. Peningkatan tata kelola dalam bidang *capacity building* Pos Lintas Batas Negara Entikong dilakukan dengan meningkatkan kerja sama, fasilitas, terlebih ketika menghadapi pandemi *coronavirus disease 2019*. Strategi lain yang dilakukan dengan *border diplomacy* atau kerjasama antar Indonesia dengan Malaysia.

PENDAHULUAN

Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun memiliki berbagai tantangan yang signifikan. Permasalahan di perbatasan Kalimantan Barat meliputi permasalahan daerah yang masih terisolir dan berada di pedalaman dengan kondisi alam yang sulit dijangkau (Arifin, 2013). Rendahnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat juga menjadi penyebab banyaknya kegiatan seperti *illegal logging*, *illegal trading*, dan *trafficking* (Edyanto, 2007). Kecenderungan masyarakat terhadap negara tetangga menjadi pemicu lunturnya nilai nasionalisme yang disebabkan rendahnya akses terhadap informasi (Mayona & Kusmastuti, 2016). Peran pemerintah menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan tata kelola yang baik di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Upaya yang dapat dilakukan yakni sinergitas dengan dukungan publik untuk menciptakan identitas nasional yang kuat, sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan mudah tercapai. Aspek kesejahteraan ini yang nantinya akan memainkan peran penting dalam membangun kawasan perbatasan yang akan memperbaiki perekonomian masyarakat serta mengatasi kemungkinan tantangan serta permasalahan tertentu (Triesanto & Simanjuntak, 2018). Komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak Kalimantan Barat berpotensi untuk mengatasi dalam mengatasi tantangan yang ada.

Posisi Kalimantan barat berbatasan langsung dengan daerah teritorial kedaulatan negara tetangga yakni Malaysia. Wilayah perbatasan negara di Entikong Kalimantan Barat dapat digolongkan menjadi kawasan yang sangat strategis (Kennedy, dkk., 2018). Suatu kebijakan diperlukan dalam pembangunan yang dapat membantu kawasan daerah perbatasan ini lepas dari status ketertinggalan. Kebijakan pembangunan dan tata kelola yang dimulai dari Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang hidup dan tinggal di kawasan perbatasan Entikong (Zein, 2020). Agenda pembangunan PLBN di kawasan perbatasan Entikong menjadi kata kunci yang paling penting terutama untuk menjamin peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan (Sudiar, 2015). Ketertinggalan yang cukup banyak dan kemiskinan di wilayah perbatasan Entikong

menandakan bahwa proses pengembangan dan pembangunan belum terlaksana dengan baik.

Pembangunan PLBN Entikong masih belum berhasil mengentaskan permasalahan di wilayah perbatasan yang terjadi hingga saat ini, terlebih pandemi *Coronavirus Disease 2019* menyebabkan imbas cukup besar bagi setiap kawasan di Indonesia. Pandemi *Covid-19* adalah bentuk gangguan yang berbeda dari gangguan lainnya yang dapat mempengaruhi setiap sektor yang ada dalam suatu negara bahkan di dunia (Fahrika & Roy, 2020). Pergerakan dunia yang mulai terpengaruh terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi global yang mulai terhambat. Hal ini disebabkan terganggunya permintaan dan pasokan serta ketidakstabilan dalam ekonomi global yang menyebabkan kegiatan ekonomi mulai menurun dan bahkan terhentikan karena penyebaran dari pandemi *Covid-19* (Asare & Barfi, 2021). Penekanan mobilitas dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19*.

Imbas pandemi *Covid-19* dalam bidang politik diyakini telah mempengaruhi politik global dan hubungan internasional secara besar-besaran. Negara-negara di dunia banyak didapati dengan sengaja menangguk hak-hak sipil dan politik dalam menghadapi tantangan dari pandemi *Covid-19* di negaranya. Ketegangan diplomatik antar negara di dunia terjadi karena terpengaruh oleh hal-hal yang juga membuat ketegangan pada perdagangan serta transportasi obat-obatan dan peralatan rumah sakit yang dibutuhkan oleh setiap negara tidak berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing negara. Tindakan dalam menafsirkan dan menanggapi pandemi *Covid-19* pada dasarnya merupakan tindakan politik seperti kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh setiap negara untuk memberlakukan kontrol perbatasan, karantina penduduk, pengelolaan informasi publik dan sikap-sikap terhadap negara lain, maka dari itu pandemi ini tidak hanya merusak politik pada tatanan global, namun juga memberikan dampak besar terhadap sistem politik secara nasional. Hal ini yang diyakini dapat memberikan dampak buruk terhadap fungsi dasar pemerintahan, hubungan pusat-negara, soliditas politik serta dapat meningkatkan angka korupsi di suatu negara (Kumar, 2020). Dampak pandemi *Covid-19* menunjukkan sebuah tantangan besar dan secepatnya membutuhkan strategi penyelesaian.

PLBN Entikong memiliki kelebihan utama pada bidang infrastruktur. Infrastruktur bersifat fisik seperti kantor PLBN, terminal darat internasional serta infrastruktur lainnya telah berhasil diselesaikan sehingga terhindar dari dampak pandemi *Covid-19* (Johannes, 2019). PLBN Entikong sudah berhasil melakukan pembangunan fisik, namun pemerintah juga perlu melakukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) terhadap lembaga atau institusi (Maisondra, 2019). PLBN Entikong selain membutuhkan penguatan tata kelola dan kerja sama serta kebijakan, pengelolaan PLBN ini dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berat seperti pandemi *Covid-19* yang dapat mengancam kesehatan global lintas negara yang berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial budaya, termasuk politik di perbatasan Indonesia (Alunaza, Anggi, & Fernandez 2020). Peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari setiap pemangku kepentingan dalam mitigasi lonjakan arus lalu lintas pekerja migran Indonesia melalui wilayah perbatasan Entikong yang terjadi selama pandemi *Covid-19*.

Kebijakan setiap negara selama pandemi *Covid-19* berlangsung yaitu melakukan *lockdown* yang menutup semua pintu masuk negara demi menghambat laju penularan virus *SARS-Cov-2*, termasuk perbatasan Entikong yang membendung arus migrasi internasional. Penguncian akses untuk keluar maupun masuk antar negara yang dilakukan sebagai suatu upaya dan langkah efektif dalam menekan laju serta mencegah berbagai ancaman yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19* (Poudel & Subedi, 2020). Penutupan ini kemudian berdampak sangat besar bagi seluruh bidang kehidupan utamanya gangguan mobilitas internasional khususnya pada tahun 2020 hingga 2021. Perubahan signifikan pada tingkat pergerakan migrasi mengubah tren migrasi kerja di seluruh dunia dengan menciptakan kebutuhan sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi (Mangku, 2019). Penutupan wilayah perbatasan Entikong sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, dan orientasi kebijakan pemerintah terutama terkait pembatasan perjalanan. Dampak yang muncul berupa diskriminasi maupun tindak kriminal di wilayah perbatasan Entikong, sehingga penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian

khusus pada pekerja migran terutama dalam dampak sektoral tertentu dari pandemi *Covid-19*.

Kajian *capacity building* menjelaskan bahwa terdapat persamaan dalam strategi pembangunan sosial dan ekonomi daerah perbatasan yaitu dilakukan dengan peningkatan kapasitas melalui mekanisme administrasi, ekonomi organisasi dan sosial yang konsisten yang diterapkan pada perancangan program-program perencanaan strategis pengembangan tata ruang dan sosial ekonomi kawasan perbatasan (Sharaldae, 2021). Strategi pembangunan melalui cara tersebut masih berlaku untuk kawasan perbatasan Rusia dan masih belum mampu mengatasi seluruh latar belakang permasalahan ketertinggalan dan kemiskinan yang mengakar seperti di wilayah perbatasan Entikong, terlebih pasca adanya pandemi *Covid-19*. Upaya penguatan tata kelola oleh PLBN Entikong perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam mitigasi pekerja migran Indonesia di perbatasan Entikong dalam mitigasi pekerja migran Indonesia pasca *Covid-19* yang akan memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah lintas batas. Kajian ini disajikan untuk membahas tata kelola PLBN dalam bidang *capacity building* serta tata kelola PLBN Entikong melalui *border diplomacy* pada masa penanganan *Covid-19* di perbatasan Entikong Kalimantan Barat.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian deskriptif dengan kerangka teori *border governance* dan konsep fungsi vitalisasi. Teknik pengumpulan data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara di lapangan kajian serta studi pustaka (Sugiyono, 2010). Sumber data kajian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada Koordinator Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Entikong, kepala imigrasi kelas II Entikong Kalimantan Barat dan Camat Entikong serta staf dari PLBN Entikong. Data sekunder bersumber dari studi pustaka yang berasal dari jurnal, laporan kajian, buku, dokumen resmi, maupun artikel dari internet dengan sumber yang dapat dipercaya. Analisis data meliputi beberapa tahap yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian dan penarikan

kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola PLBN Bidang *Capacity Building* dan Infrastruktur

PLBN memiliki fungsi pertahanan dan keamanan baik ekonomi, perdagangan maupun politik. Wilayah PLBN sering dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah. Potensi yang muncul di wilayah PLBN harus diimbangi dengan peningkatan infrastruktur dan *capacity building*. Infrastruktur dan *capacity building* termasuk ke dalam indeks yang potensial untuk menjadi tolak ukur penentu dari penataan tata kelola yang baik. Capaian aspek yang terdapat dalam *capacity building* ini terdiri atas peningkatan efisiensi, responsivitas dan efektivitas yang dapat dilakukan melalui beberapa upaya dan strategi untuk pembangunan kualitas kinerja dari pemerintahan (Haryono, 2012). Peningkatan kualitas dalam *capacity building* dibutuhkan oleh pemerintah untuk dapat menyesuaikan segala urgensi yang terjadi dalam masa kini maupun masa mendatang, sehingga mampu mendapatkan sebuah keputusan ataupun langkah konkret dalam menghadapi segala tantangan. *Capacity building* ini meliputi tiga dimensi penting di dalamnya yaitu merujuk kepada pengembangan sumber daya alam, pengukuhan organisasi dan reformasi kelembagaan. Peningkatan infrastruktur dan *capacity building* di PLBN sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai diyakini dapat memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan berkontribusi cukup besar terhadap kemajuan masyarakat salah satunya di daerah perbatasan. Pembangunan infrastruktur perbatasan berdampak cukup besar bagi masyarakat setempat melalui konstruksi sipil yang dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kemudahan akses di kawasan perbatasan serta peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat perbatasan (Mubarak, 2021). PLBN Entikong memiliki kapasitas yang cukup baik, namun dengan adanya pandemi diyakini bahwa kapasitas tersebut membutuhkan suatu kemajuan agar permasalahan-permasalahan selama pandemi dapat diatasi dengan baik. Tata kelola

yang baik menjadi solusi di PLBN Entikong agar dapat menanggapi setiap permasalahan dengan lebih cepat dan dapat menanggulangi segala hal yang tidak dapat terprediksi untuk kedepannya. Strategi yang dijalankan oleh PLBN Entikong pada masa pandemi *Covid-19* merujuk kepada konteks yang spesifik yaitu peningkatan pengelolaan pada aktivitas kedatangan dari Malaysia. Strategi ini tentunya telah melalui perencanaan atas dasar kondisi dan situasi yang terjadi selama masa pandemi berlangsung. Pengelolaan kedatangan dari Malaysia menjadi salah satu upaya yang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pertahanan di masa pandemi.

Penutupan pintu keberangkatan di perbatasan PLBN Entikong tidak diberlakukan secara penuh, melainkan PLBN Entikong masih memberikan pelayanan terhadap kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Pelayanan kedatangan tersebut menuntut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan instansi yang ada di PLBN Entikong untuk dapat bekerja lebih ekstra selama masa pandemi dibandingkan dengan instansi-instansi lainnya. Aktivitas yang dilakukan di perbatasan secara khusus hanya pada pintu kedatangan yang memproses pemulangan PMI dari Malaysia dan ditangani oleh instansi BP2MI dibantu dengan Badan Kesehatan dan Keamanan dalam pelaksanaannya. Rekap data menunjukkan bahwa jumlah PMI yang datang kurang lebih sebanyak 2500 orang pada tahun 2019, namun setelah pandemi terjadi yaitu sesuai dengan rekapitulasi pada tahun 2020, jumlah kedatangan PMI meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu berkisar sekitar kurang lebih dari 5000 orang. Jumlah negara asal dari kedatangan para PMI sebelum pandemi rata-rata berasal dari Malaysia dan terkadang juga berasal dari Brunei, namun ketika masa pandemi saat ini kedatangan PMI hanya berasal dari Malaysia dikarenakan Brunei benar-benar menutup penuh akses keluar masuk dari dan ke negaranya.

Total Jumlah kedatangan PMI bermasalah dari Malaysia pada masa pandemi yakni selama dua periode terhitung dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Lonjakan kedatangan PMI yang mencapai angka dua kali lipat dari kedatangan PMI sebelum masa pandemi berlangsung 351 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Kantor Urusan Konsuler Republik Indonesia (KURI), 4359 deportasi migrasi, 11 pencegahan

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural, 111 meninggal dunia, 12 sakit, dan 4 terlantar, jumlah total pada periode tahun 2020 angka kepulangan PMI dari Malaysia mencapai 4848. PMI dengan rincian sedangkan untuk periode Januari-Juli pada tahun 2021 angka kepulangan PMI mencapai angka 2333 jiwa dengan rincian 144 KBRI/KURI, 2011 deportasi migrasi, 58 pencegahan TKI non prosedural, 102 meninggal dunia, 15 sakit, dan 3 terlantar (Martoyo, dkk., 2022). Angka ini menunjukkan bahwa banyak PMI yang kembali ke Indonesia dikarenakan terdampak oleh pandemi *Covid-19* yang membuat para PMI harus berhenti untuk bekerja dan dipulangkan kembali ke daerah asalnya. Tahun pertama semenjak masa pandemi *Covid-19* dimulai, jumlah PMI yang dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong memiliki persentase yang paling tinggi di antara yang lainnya. Data yang didapat pada jumlah kedatangan PMI selama tujuh bulan pada tahun 2021 yang juga menunjukkan angka persentase yang tinggi terhadap kedatangan PMI melalui deportasi imigrasi jika dibandingkan dengan jumlah angka kedatangan lainnya. Olahan data kedatangan PMI ini secara umum memiliki kesamaan yang cukup signifikan dengan persentase kedatangan yang tinggi melalui jalur deportasi imigrasi dan PMI yang terlantar untuk setiap periode tahun 2020 dan 2021 tidak lebih dari lima orang.

Berdasarkan total data kedatangan PMI di atas dapat dilihat bahwa terdapat jalur kedatangan yang memperlihatkan jumlah lonjakan yang cukup tinggi untuk setiap periode selama pandemi berlangsung. Jumlah kepulangan PMI yang dimaksud ini terdapat pada Jalur KBRI atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Jalur Deportasi Imigrasi. Rincian data dari dua jalur kedatangan ini periode 2020 dapat dilihat setiap bulannya sebagai berikut: Januari 13 orang, Februari 6 orang, Maret 44 orang, April 31 orang, Mei 25 orang, Juni 52 orang, Juli 35 orang, Agustus 13 orang, September 11 orang, Oktober 33 orang, November 52 orang dan Desember 36 orang. Tahun 2021 rincian data terdiri atas Januari 28 orang, Februari 9 orang, Maret 11 orang, April 38 orang, Mei 5 orang, Juni 23 orang, Juli 30 orang. Perbandingan data tersebut menunjukkan bahwa data kepulangan PMI jalur KBRI/KJRI termasuk dalam kategori yang lebih rendah bahkan ditemukan pada beberapa bulan di periode 2020 maupun

2021, kedatangan PMI jalur KBRI/KJRI tidak mencapai angka lebih dari 10 orang. Terhitung jumlah total dari kepulangan PMI jalur KBRI/KJRI selama periode 2020 adalah sebanyak 351 PMI diikuti jumlah total sebanyak 144 PMI dari rentang waktu Januari hingga Juli pada tahun 2021. Data tertinggi dari kedatangan PMI jalur KBRI/KJRI berada di pertengahan dan akhir tahun dari periode 2020 diikuti dengan data tertinggi dari kedatangan PMI pada pertengahan periode 2021 Januari-Juli, tepatnya pada bulan April 2021 jumlah tertinggi angka kedatangan PMI di PLBN Entikong melalui jalur KBRI/KJRI pada tahun 2021 ini hanya mencapai angka 38 orang.

Jumlah angka kedatangan PMI dari Malaysia melalui jalur deportasi imigrasi memiliki kapasitas yang cukup besar untuk setiap bulannya. Hal tersebut dapat dilihat pada terlihat pada perkiraan total kedatangan PMI yaitu kurang lebih sebanyak 5000 PMI, sebagian besar dari lonjakan kedatangan PMI selama masa pandemi *Covid-19* tersebut berasal dari kedatangan PMI jalur deportasi imigrasi dalam setiap bulannya. Total kedatangan PMI tersebut merupakan dampak nyata yang dapat dilihat dari pandemi *Covid-19* yang menuntut untuk adanya pemberhentian para PMI yang berada di Malaysia. Banyak PMI yang terpaksa berhenti ataupun diberhentikan sehingga pemerintah memilih untuk memulangkan PMI kembali ke daerah asalnya masing-masing (Maisondra, 2019). Penekanan risiko atau potensi penyebaran *Covid-19* yang lebih luas lagi tentunya ditekan oleh pemerintah Malaysia.

Rincian data kedatangan PMI jalur deportasi imigrasi tahun 2020 setiap bulannya sebagai berikut: bulan Januari sebanyak 260 orang, Februari sebanyak 162 orang, Maret sebanyak 516 orang, April sebanyak 327, Mei sebanyak 626 orang, Juni sebanyak 189 orang, Juli sebanyak 138 orang, Agustus sebanyak 421 orang, September sebanyak 331 orang, Oktober sebanyak 296 orang, November sebanyak 703 orang, Desember sebanyak 363 orang. Penurunan jumlah kedatangan terjadi pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut: bulan Januari sebanyak 208 orang, Februari sebanyak 434 orang, Maret sebanyak 363 orang, April sebanyak 327, Mei sebanyak 626 orang, Juni sebanyak 189 orang, Juli sebanyak 138 orang. Kedatangan PMI jalur deportasi imigrasi tidak ada yang kurang dari 50

orang yang dipulangkan untuk setiap bulannya selama dalam periode 2020-2021. Kedatangan PMI dengan angka tertinggi pada periode 2020 terlihat pada bulan November yaitu mencapai angka 703 orang diikuti dengan bulan Mei yang mencapai angka 626 orang dan dengan kedatangan terendah pada bulan Juli sebanyak 138 orang. Pada periode 2021 angka kedatangan PMI tertinggi mencapai angka 520 orang yaitu terjadi pada bulan Mei diikuti data terendah yaitu sebanyak 82 orang pada bulan April. Jumlah total dari kedatangan PMI melalui deportasi imigrasi periode 2020 mencapai angka 4332 PMI diikuti dengan jumlah total pada rentang waktu Januari-Juli tahun 2021 sebanyak 2011 PMI telah dipulangkan ke Indonesia.

PMI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk kepulangannya ke daerah asal. Koordinator BP2MI mengatakan bahwa BP2MI melakukan pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap PMI purna (PMI yang dideportasi ataupun yang mandiri). Pemberdayaan ini telah terdapat dua tempat pemberdayaan PMI purna di Pontianak tepatnya yaitu di Sungai Raya dan Sungai Pinyu. PMI purna pada umumnya akan dilihat dari usia, tingkat produktif dan profil lainnya dari PMI purna itu sendiri. Pemberdayaan PMI purna terdapat pihak penanggung jawab dilakukan dengan rekanan atau koperasi sebab BP2MI juga melakukan kerja sama dan melibatkan pemerintah desa sehingga dalam koordinasi akan dilaksanakan monitoring terhadap PMI purna dan desa tersebut secara beriringan. Pemberdayaan terhadap PMI purna sangat dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas dan peningkatan dalam bidang ekonomi, selain dilakukan di Pontianak, pemberdayaan ini juga dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Hartanto, 2022). Pemerintah memastikan proses pemberdayaan PMI melalui BP2MI dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi pada daerah asal terutama dalam bidang ekonomi.

Koordinasi terkait peningkatan *capacity building* PLBN Entikong dengan meningkatkan kerja sama, fasilitas dan secara umum dapat dikatakan bahwa kapasitas yang dimiliki PLBN Entikong cukup baik. Munculnya permasalahan dalam peningkatan *capacity building* di PLBN Entikong tetap ada yakni selama pandemi *Covid-19* merujuk ke permasalahan lonjakan

pelintas yang datang dengan minimnya ruang tunggu sehingga pada saat pandemi hal yang harus ditingkatkan pada PLBN Entikong utamanya adalah penyediaan kapasitas ruang tunggu yang lebih memadai bagi para pelintas atau kepulangan PMI selama pandemi masih berlangsung (Alunaza, H., Anggi, P., & Fernandez, F. (2020). Bentuk tata kelola PLBN Entikong sebelum ataupun ketika pandemi mulai berlangsung terbilang sama. Perbedaan hanya terletak pada pelayanan yang diberikan. Aktivitas yang dilakukan di PLBN Entikong lebih berfokus kepada kepulangan sebab tidak adanya aktivitas di pintu keberangkatan. Pelayanan maupun prosedur tambahan digunakan untuk memenuhi setiap protokol yang diperlukan selama masa pandemi. Peningkatan *capacity building* selama pandemi *Covid-19* di bidang keamanan di PLBN Entikong tidak didapati aparat tambahan sebab keamanan di PLBN Entikong sudah sesuai dan cukup memadai dengan pembagian yang rata di setiap area PLBN Entikong, kecuali ketika pada masa lebaran dan masih dalam keadaan pandemi didapati aparat tambahan dari kepolisian dalam menjaga keamanan di PLBN Entikong. Penambahan aparat dalam pengamanan pada kondisi tertentu merupakan salah satu bentuk peningkatan *capacity building* PLBN Entikong.

Lembaga pendamping yang terlibat dalam melakukan peningkatan *capacity building* di PLBN Entikong selama masa pandemi yakni lembaga-lembaga yang berada di kawasanya seperti BP2MI, imigrasi dan lain sebagainya. Sistem yang dijalankan oleh PLBN Entikong selama ini diyakini sudah termasuk dalam kategori yang baik sehingga tidak membutuhkan pembaruan sistem untuk menghadapi masa pandemi. Pembaruan sistem bisa saja dilakukan dengan pengajuan bentuk kebutuhan layaknya *top down* dan *bottom up*, jika misalnya ada ataupun diperlukannya hal tersebut. PLBN Entikong pemerintahan provinsi juga mengambil tindakan melalui Satuan Tugas (Satgas) dalam memberikan bantuan terhadap kedatangan selama masa pandemi berlangsung untuk menopang dan membantu peningkatan *capacity building*. Pelaksanaan tugas kedatangan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan lain sebagainya dapat dikatakan kurang efektif tidak akan mampu memberikan pelayanan karena tidak adanya Satgas selama kedatangan. Tugas adanya Satgas selama masa pandemi dengan

banyaknya tugas-tugas yang ada di PLBN Entikong sangat terbantu selama masa pandemi.

Standar prosedur terhadap segala operasional di PLBN Entikong pada umumnya dimiliki oleh masing-masing instansi layaknya SOP terhadap pengelolaan maupun pelayanannya selama masa pandemi *Covid-19*. Prosedur lalu lintas sebelum dan setelah adanya pandemi *Covid-19* mengalami perubahan, sebelumnya menggunakan Customs, Immigration, Security (CIS), setelahnya menambahkan prosedur Customs, Immigration, Security, Quarantine (CISQ). Perubahan prosedur tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan tata kelola PLBN Entikong (Alunaza, dkk., 2022). Sasaran kerja, kinerja maupun budaya kerja di PLBN Entikong mendapat pengaruh yang cukup signifikan dengan adanya pandemi *Covid-19*. Jumlah pendatang yang dapat dikatakan meningkat cukup tinggi selama pandemi, hal ini memungkinkan adanya prosedur tambahan berupa *Polymerase chain reaction test* (PCR) atau *Swab Test Antigen* dan prosedur tambahan lainnya. Pelintas PLBN Entikong diharuskan memiliki waktu untuk dapat meninggalkan PLBN. Prosedur yang telah disebutkan ini sangat memberikan pengaruh terhadap budaya kerja di PLBN Entikong, namun adanya kerja sama antara pihak PLBN dengan instansi-instansi yang ada, kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masa pandemi dapat diatasi dengan lebih baik lagi.

Tata Kelola PLBN Entikong melalui *Border Diplomacy* selama Masa Pandemi *Covid-19*

Pandemi *Covid-19* mulai menyebar ke setiap sudut di dunia hal ini secara langsung memberikan dampak yang berpengaruh terhadap hubungan antar negara, salah satunya Indonesia dan Malaysia tepatnya di perbatasan Indonesia dan Sarawak yaitu Kawasan Perbatasan di Entikong. Malaysia mulai mengambil kebijakan untuk menutup pintu perbatasannya dengan Indonesia namun, masih didapati beberapa aktivitas yang dibutuhkan untuk dilakukan antar perbatasan ataupun sesama PLBN oleh kedua negara ini selama masa pandemi. Strategi yang dapat dilakukan yakni dengan menghasilkan sebuah kesepakatan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yaitu mengenai perubahan jam pelayanan di PLBN seperti pengurangan waktu pelayanan selama masa pandemi *Covid-19* berlangsung. Kerja sama ini dikenal dengan

istilah *border diplomacy* (Oegroseno, 2016). Pengurangan waktu pelayanan selama masa pandemi *Covid-19* diinisiasi agar keadaan yang ada di setiap PLBN dapat lebih terkontrol untuk kedepannya dan berguna menjaga keamanan dan memitigasi penyebaran *Covid-19*. Pengurangan waktu pelayanan di PLBN diterapkan menjadi salah satu inisiatif kebijakan dalam menghadapi masa pandemi.

PLBN Entikong dituntut untuk menggunakan salah satu instrumen dalam hubungan internasional yaitu *border diplomacy* dalam melakukan penanggulangan masalah pengelolaan wilayah perbatasan maupun kerja sama internasional. Penerapan *border diplomacy* dapat digambarkan dalam kesepakatan Tebedu dan Entikong ketika didapat perubahan jam pelayanan, selain itu adanya kerja sama dalam melakukan impor *oxygen* yang dapat dilakukan di zona Malaysia. Kerja sama *border diplomacy* dapat menyebabkan orang Indonesia yang mengurus hal ini bisa masuk ke Malaysia walaupun sebelumnya tidak bisa melakukan atau memperbolehkan hal tersebut sebab adanya kebijakan untuk menutup jalur keluar masuk orang maupun barang di Malaysia. Lalu lintas ke Malaysia masih dapat dilakukan apabila dalam kondisi darurat, namun tetap seizin pemerintah Malaysia. Kondisi yang dimaksudkan yakni pengobatan sakit keras dan hal-hal darurat lain. Prosedur perizinan yang harus dilakukan oleh PMI atau Warga Negara Indonesia (WNI) kepada KJRI Malaysia yakni melengkapi persyaratan khusus *application form*. Penggunaan pendekatan melalui *border diplomacy* ini PLBN Entikong dapat mengupayakan suatu tindakan untuk melakukan negosiasi agar dapat dilakukannya proses impor yang dibutuhkan dan disepakati oleh kedua negara selama masa pandemi *Covid-19* berlangsung dan hal tersebut pada akhirnya dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik, meskipun sebelumnya tidak diperbolehkan.

Efisiensi tata kelola PLBN Entikong selama masa pandemi diyakini tidak mengalami penurunan sebab fokus aktivitas yang dilakukan hanya pada pintu kedatangan saja. Pintu keberangkatan ditutup dan fokus utama hanya ada pada kedatangan kapasitas tata kelola PLBN yang sudah cukup memadai dalam melakukan pelayanan pada pintu kedatangan (Triesanto & Simanjuntak, 2018). Tata kelola PLBN Entikong lebih komprehensif dan tidak membutuhkan

banyak tenaga ekstra dan bahkan lebih efisien untuk saat ini. Pandemi dimulai PLBN juga mengambil tindakan langsung seperti persiapan sarana-prasarana serta persiapan terhadap sumber daya manusianya karena beberapa instansi yang berfokus seperti KKP memuat tambahan-tambahan pegawai untuk pengambilan sampel-sampel dan hal lainnya yang dibutuhkan selama masa pandemi. Optimalisasi kinerja dilakukan untuk mencapai efisiensi dan peningkatan tata kelola PLBN Entikong.

Faktor yang menjadi ancaman terhadap tata kelola PLBN Entikong selama masa pandemi utamanya adalah penyebaran pandemi *Covid-19* itu sendiri. Pandemi *Covid-19* menyebabkan adanya kasus deportasi dengan kasus pemulangan *human terrorist* yang berasal dari Malaysia dan adanya jalur ilegal yang dilalui oleh para pelintas karena penutupan jalur resmi antara Indonesia dan Malaysia. Penggunaan jalur ilegal yang dilalui oleh para pelintas batas pada tahun ini terhitung hanya sebanyak 58 orang. Pihak-pihak yang masuk melalui jalur ilegal ini jika dapat dimonitor oleh Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) maka dapat secara langsung dibawa ke PLBN untuk kemudian di karantina (Patriani, dkk., 2022). Ancaman yang dapat muncul dalam penyebaran *Covid-19* di Indonesia maupun Malaysia ketika jika akses jalur ilegal yang dilakukan ini tidak termonitor sebab tidak diketahui bahwa pihak-pihak tersebut apakah reaktif atau tidak sehingga secara langsung hal ini juga dapat menjadi ancaman. Tantangan dalam efisiensi tata kelola tetap ada terlebih selama pandemi *Covid-19*, namun PLBN Entikong tetap menghadapi tantangan dalam memastikan semua protokol kesehatan diterapkan dengan baik.

Pandemi *Covid-19* membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif yang didapati oleh PLBN Entikong sebagai imbas dari pandemi *Covid-19* ini yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum berlangsungnya pandemi *Covid-19*. Instansi ataupun ASN yang bertugas juga sudah mulai cakap dan dapat memahami situasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Pelayanan yang dapat ketika masa pandemi belum dimulai dapat dikatakan kurang baik atau terlambat dalam memberikan pelayanan. Ditinjau berdasarkan segi fisik, semua dapat dikatakan baik, orang-orang di dalamnya

maupun pelayanan-pelayanan yang disediakan di dalamnya. Dampak negatif dari masa pandemi *Covid-19* yang terjadi dalam tata kelola PLBN Entikong lebih mengarah ke permasalahan jalur ilegal yang dilalui oleh para pelintas batas agar dapat melakukan akses ke Indonesia maupun ke Malaysia (Triesanto & Simanjuntak, 2018). Tuntutan tingkat kerja yang semakin meningkat selama masa pandemi juga menjadi dampak negatif, namun hal ini tetap disanggupi oleh seluruh pihak yang berada di PLBN Entikong karena segala yang terjadi di kawasan perbatasan ini tetap merupakan tanggung jawab dari pihak PLBN Entikong terlebih jika masa pandemi masih belum kunjung usai.

PLBN Entikong berdasarkan tugas, fungsi, mekanisme dan tanggung jawab secara proporsional sudah terbilang sangat baik. Pihak pemakai atau pengelola ditemukan tanggung jawab yang baik terhadap segala persoalan yang terjadi baik terhadap instansi-instansi yang menyanggupi segala kebutuhan dengan cepat selama pandemi berlangsung maupun sebelum pandemi mulai menyebar di kawasan tersebut. Kerja sama yang terjadi antara PLBN dengan instansi-instansi yang ada di dalamnya terkoordinir dengan baik selama masa pandemi walaupun setidaknya masih didapati sedikit kekurangan dalam pengelolaannya. Koordinasi antara Indonesia dan Malaysia perkara jalur ilegal yang dilalui oleh orang maupun barang selama masa pandemi juga dikondisikan dengan baik (Martoyo, dkk., 2022). Sinergi antara proses komunikasi yang mengarah kepada koordinasi dan komunikasi langsung oleh pihak PLBN Entikong dengan PLBN serupa di Malaysia. PLBN Entikong juga berkoordinasi bersama Pamtas Malaysia dengan proses yang cukup cepat dalam menanggapi permasalahan jalur ilegal tersebut. Sasaran dalam tata kelola PLBN Entikong untuk saat ini lebih berfokus kepada segala hal yang ada di lingkungan PLBN seperti kedatangan dari pelintas batas negara atau PMI. Hal ini mengakibatkan perhatian PLBN Entikong terhadap masyarakat perbatasan masih belum maksimal. PLBN juga sebenarnya memiliki salah satu fungsi yaitu meningkatkan kualitas dan hal lainnya terhadap masyarakat perbatasan, namun karena saat ini masa pandemi *Covid-19* menjadi urgensi utama yang harus diperhatikan PLBN Entikong. Perhatian itu tentu membuat PLBN Entikong harus bersiap siaga untuk lebih

berfokus dalam mengurus hal-hal utama yang terjadi di PLBN Entikong maupun di wilayah perbatasan Indonesia dan Sarawak.

Koordinator BP2MI meyakini bahwa tidak ditemukan kesulitan besar terhadap kedatangan PMI selama masa pandemi, karena semua instansi yang ada di PLBN memiliki sinergi yang cukup kuat dan kerja sama yang baik antar instansi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tak terduga yang dapat terjadi di waktu yang akan datang. Kebijakan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai pandemi *Covid-19* di perbatasan Entikong yakni pengadaan Satgas provinsi dan Satgas khusus perbatasan (Alunaza, dkk., 2022). Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memiliki Satgas dan ketersediaan dua tempat karantina dan terakhir juga sudah ditemukan ketersediaan vaksin yang cukup memadai di PLBN Entikong. Kesulitan hanya terjadi di awal pandemi sebab belum adanya pola pasti dari setiap tindakan yang harus dilakukan pada saat itu sehingga tata kelola di PLBN Entikong mengalami sedikit goncangan karena sebelumnya PLBN Entikong belum pernah mendapati situasi dan keadaan yang sama seperti masa pandemi ini. Upaya adaptasi dengan pola yang sudah dikenali dengan baik menjadikan setiap kekurangan yang ada dapat secara langsung diatasi bersamaan dengan peningkatan tata kelola yang baik pula di PLBN Entikong.

Kekurangan sarana dan prasarana pada PLBN Entikong secara tidak langsung dapat menjadi suatu hambatan dalam mencapai peningkatan *capacity building*. Dampak lain dapat mengarah kepada kurangnya sumber daya dalam perencanaan pada tata kelola PLBN. Tata kelola yang dapat diidentifikasi menjadi hambatan dalam pelaksanaan aktivitas yang ada di PLBN Entikong. Kekurangan kapasitas tata kelola PLBN saat ini mengarah kepada sarana dan prasarana yaitu ruang tunggu yang membutuhkan penambahan kuantitas agar dalam pelayanan kedatangan dari Malaysia tidak terdapat penumpukan yang tidak diinginkan selama masa pandemi. Keterbatasan fasilitas karantina seperti layanan kesehatan beserta alat penunjangnya juga menjadi permasalahan PLBN Entikong (Maisondra, 2019). Penumpukan yang tidak diinginkan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan

penyebaran *Covid-19* yang lebih luas pula di kawasan perbatasan.

Proses yang dilakukan dalam prosedur untuk melaksanakan karantina menyebabkan adanya waktu untuk menunggu bagi para pendatang setelah melakukan tes agar bisa segera di karantina. Penumpukan berpengaruh secara langsung terhadap keadaan di PLBN sendiri seperti kepadatan yang terjadi di ruang tunggu karena tidak adanya pembatasan terhadap pelintas yang datang dari Malaysia (Martoyo, dkk., 2022). Pelayanan yang tetap dilakukan terhadap para pelintas yang datang di luar jam operasional karena kedatangan tersebut tidak bisa diprediksi kecuali untuk pemulangan melalui deportasi imigrasi. Deportasi imigrasi terhadap PMI dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan yang menginformasikan jumlah total dari pendatang sehingga pihak yang bertugas dapat lebih siaga dalam mengawasi kedatangan PMI tersebut. Kondisi ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan peningkatan tata kelola, baik peningkatan fasilitas maupun tata kelola sumber daya manusia dalam mengatasi masalah di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Peningkatan *capacity building* PLBN Entikong dilakukan dengan meningkatkan kerja sama, fasilitas dan secara umum sudah dapat dikatakan bahwa kapasitas yang dimiliki PLBN Entikong cukup baik. Bentuk tata kelola PLBN Entikong sebelum ataupun ketika pandemi mulai berlangsung terbilang sama. Perbedaan hanya terletak pada pelayanan yang diberikan. Aktivitas yang dilakukan di PLBN Entikong lebih berfokus kepada kepulangan sebab tidak adanya aktivitas di pintu keberangkatan. Terdapat pelayanan-pelayanan maupun prosedur tambahan untuk memenuhi setiap protokol yang diperlukan selama masa pandemi. Peningkatan *capacity building* selama masa pandemi pada bidang keamanan di PLBN Entikong tidak didapati aparat tambahan sebab keamanan di PLBN Entikong sudah sesuai dan cukup memadai dengan pembagian yang rata di setiap area PLBN Entikong. Pandemi *Covid-19* juga menuntut PLBN Entikong untuk menggunakan *border diplomacy* dalam melakukan penanggulangan masalah pengelolaan wilayah perbatasan maupun kerja sama internasional. Penerapan

border diplomacy dapat mengupayakan suatu tindakan untuk melakukan negosiasi agar dapat dilakukannya proses impor yang dibutuhkan dan disepakati oleh kedua negara. Hal tersebut pada akhirnya dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik, meskipun sebelumnya tidak diperbolehkan. Tata kelola dan strategi kerja sama yang telah dilakukan mampu menjadi solusi dalam menghadapi tantangan di masa depan, termasuk pandemi *Covid-19*.

DAFTAR RUJUKAN

- Alunaza, H., Anggi, P., & Fernandez, F. (2020). The Role of STI Institutions in Mitigating the Covid-19 Outbreak in Indonesia. *Science Diplomacy Review*, 2(2), 3-15.
- Alunaza, H., Mentari, M., Putri, A., & Ernianda, A. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi Sosial Politik Masyarakat Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. *Jurnal Paris Langkis*, 3(1), 1-12.
- Arifin, S. (2013). Cross Border Approach sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 37-58.
- Asare, P., & Barfi, R. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on the Global Economy: Emphasis on Poverty Alleviation and Economic Growth. *Economics*, 8(1), 32-43.
- Edyanto, C. H. (2007). Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, 9(3), 1-10
- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respon Kebijakan yang Ditempuh. *Inovasi*, 16(2), 206-213.
- Hartanto, D. (2022). Peran UPT-BP2MI DIY dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Implikasinya terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 38-50.
- Johannes, A. W. (2019). Penanganan Masalah-Masalah Sosial di Kecamatan Kawasan Perbatasan Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2), 50-61.
- Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., Lumbantoruan, R., Tampubolon, E., Heatubun, A. B., & Nomleni, A. (2018). Kajian Normatif Pengelolaan Perbatasan dan Kelembagaan Pusat-Daerah Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara. *Ikraith Ekonomika*, 1(2), 67-77.
- Kumar, A. (2020). Impacts of Corona-Crisis on Global Politics. *SSRN*, 1(2020), 1-9
- Maisondra, M. (2019). Strategi dan Dampak Pembangunan Kawasan PLBN Entikong dalam Meningkatkan Perdagangan dan Keamanan Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 62-70.
- Mangku, D. G. S. (2018). Peran Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam Menjaga Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 167-174.
- Martoyo, M., Alunaza, H., Ernianda, A., Putri, A., & Montoya, M. A. L. M. (2022). Implication of the Covid-19 Pandemic on the Governance of International Trade in the West Kalimantan's Entikong Border. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 6(1), 1-9.
- Mayona, E. L., Salahudin, S., & Kusmastuti, R. (2016). Penyusunan Arah Strategi dan Prioritas Pengembangan Perbatasan antar Negara di Provinsi Kalimantan Barat. *Tataloka*, 13(2), 119-134.
- Mubarak, M. M. (2021). Analisis Evaluasi Ketersediaan Infrastruktur pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia (Kasus Kabupaten Nunukan). *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 2(1), 45-53.
- Oegroseno, A. H. (2006). *Kebijakan Dasar Indonesia dalam Penetapan Perbatasan Maritim*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Patriani, I., IP, S., Olifiani, L. P., & S IP, M. H. I. (2022). *Optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)-P2TKI Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Poudel, K., & Subedi, P. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Socioeconomic and Mental Health Aspects in Nepal. *International Journal of Social Psychiatry*, 66(8), 748-755.
- Sharaldaev, B. B., Belomestnov, V. G., Sharaldaeva, I. A., Belomestnova, I. A., Romanova, I. V., Sharaldaeva, A. B., & Garmaev, S. D. (2021). Mechanisms for Capacity Building of Border Regions Through Cross-Border Cooperation. *IOP Conference Series: Earth*

- and Environmental Science*, 885(1), 1-15
- Sudiar, S. (2017). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489-500.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Triesanto, O., & Simanjuntak, R. (2018). Signifikansi Peran Negara dalam Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Entikong Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial*, 7(2), 153-178.
- Zein, Y. A. (2020). Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Berbasis Pemenuhan Hak Asasi Manusia Warga Negara. *Borneo Law Review*, 4(1), 79-100.